



Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

Amiany^{1*}, Desi Riani², Fredyantoni F. Adji³

^{1,2,3}Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

* (Corresponding Author) E-mail : amiany@arch.upr.ac.id

Perkembangan Artikel :

Disubmit : 30 April 2023

Diperbaiki : 11 Mei 2023

Diterima : 11 Mei 2023

Abstrak: Kegiatan Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat ini dapat membantu pemerintah desa untuk mengelola ruang hidup yang dapat dijadikan dokumen model perencanaan melalui dokumen Rencana Tata Ruang Perdesaan sehingga dapat mendukung tercapainya sebuah perencanaan penggunaan tanah/lahan yang lebih baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penataan dan pemanfaatan ruang atas kawasan desa. Desa Talekung Punei merupakan salah satu dari 21 Desa di Wilayah Kecamatan Kapuas Murung yang belum ada tanda batas desa yang permanen dengan desa tetangga. mempunyai luas wilayah seluas $\pm 49.383.500$ meter persegi ditambah ada perusahaan sawit skala nasional yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Potensi yang dimiliki desa Talekung Punei adalah ruang-ruang kawasan desa yang belum termanfaatkan dengan maksimal dengan tetap memperhatikan kepentingan ruang bagi masyarakat untuk pengelola wilayah Desa melalui perencanaan Tata Guna Lahan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Adanya peta tata Guna Lahan dan perencanaan tata ruang wilayah desa secara partisipatif dan berkelanjutan. Terinventarisasinya masalah, solusi dan inisiatif tingkat desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran yaitu: sosialisasi pembuatan peta, pendampingan kegiatan survey dan pengumpulan data serta evaluasi.

Kata Kunci: Pemetaan, tata ruang desa, partisipatif

Pendahuluan

1.1. Analisis Situasi

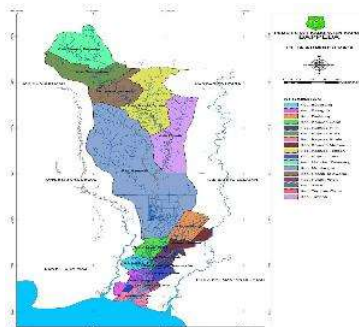
Secara administrasi, Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah daratan sekitar 153.564 Km² dan jumlah penduduk 2.047.550 (BPS 2008) terbagi dalam 14 Daerah Otonom, yakni 1 Kota dan 13 Kabupaten, 107 Kecamatan, 108 Kelurahan, 1.298 Desa, dan 24 Unit Pemukiman Transmigrasi. Penduduk Kalimantan Tengah juga masih menghargai keberadaan pewilayahan tradisional berdasarkan tatanan kemasyarakatan hukum adat dengan adanya 71 Kadamangan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan Kabupaten yang mempunyai visi

adalah Kabupaten Pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Kapuas memiliki Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas berdasarkan kepada Kepmenhut No. 529 tahun 2012 tanggal 25 September 2012 dan sesuai dengan arahan Gub Kalteng dengan surat No. 188.342/418/Huk tanggal 3 Mei 2013 yang mengacu pada SK Menhut No. S.431/Menhut-VII/2012 tanggal 28 September 2012 tentang persetujuan substansi kehutanan.

Kabupaten Kapuas sangat strategis bila dilihat dari segi lokasi, berada tepat di perlintasan jalan transkalimantan bagian selatan menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Banjarmasin baik sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pelayanan pemerintahan di wilayah Kapuas, merupakan daya tarik (*attracting power*) tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk tinggal menetap di daerah ini guna memperoleh kemudahan akses. Hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan permukiman dan infrastruktur kota.

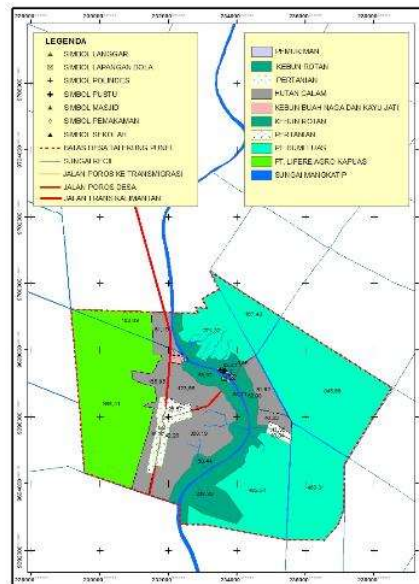
Luas Wilayah Kabupaten Kapuas sekitar 1,499,900 hektar dengan pembagian pola ruang sebagai berikut Kawasan Lindung seluas 358,809.32 dan Kawasan Budidaya seluas 1,141,090.67. Dan semua pembagian pola ruang itu benar benar sudah direncanakan dengan matang, tetapi yang perlu di ingat adalah bagaimana perencanaan detail kabupatennya apakah sejalan dengan perencanaan di tingkat bawahnya, yang di dukung dengan data yang detil juga di tingkat bawahnya baik mengenai tata kelola kawasannya maupun perencanaan perdesaan di salah satu kecamatan juga data potensi desa dan data sosial ekonomi di satu kecamatan yang akan mendukung perencanaan detail strategis Kabupaten. Kecamatan Kapuas Murung merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kapuas berada kurang lebih 17 Km dari Ibu Kota Kabupaten Kapuas



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kapuas

Desa Talekung Punei merupakan salah satu dari 21 Desa di Wilayah Kecamatan Kapuas Murung yang berada kurang lebih 17 Km dari Ibu Kota Kecamatan Kapuas Murung yang merupakan salah satu desa perbatasan lintas antar desa dengan desa tetangga belum ada tanda batas yang Permanen . Desa Talekung Punei mempunyai luas wilayah seluas $\pm 49.383.500$ meter per segi ditambah ada perusahaan sawit skala nasional yg berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Potensi yang dimiliki desa Talekung

Punei adalah ruang-ruang kawasan desa yang belum termanfaatkan dengan maksimal dengan tetap memperhatikan kepentingan ruang bagi masyarakat untuk pengelola wilayah Desa melalui perencanaan Tata Guna Lahan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Secara kehidupan sosial mayoritas penduduk di Kecamatan ini adalah suku Dayak Ngaju dan sebagian lagi adalah Dayak Ma'anyan. Sebagian warga di desa ini adalah bermata pencaharian dengan mengandalkan sumber daya alam seperti bertani, berkebun karet, pada penangkap ikan.



Gambar 2. Peta Tata Guna lahan di Desa Talekung Punei (201)

Dengan kegiatan pemetaan ini akan dapat membantu pemerintah desa untuk mengelola ruang hidup yang dapat dijadikan dokumen model perencanaan melalui dokumen Rencana Tata Ruang Perdesaan sehingga dapat mendukung tercapainya sebuah perencanaan penggunaan tanah/lahan yang lebih baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penataan dan pemanfaatan ruang atas kawasan desa.

Dengan kegiatan Program kemitraan wilayah ini, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Talekung Punei untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, pemanfaatan dan perlindungan ruang masyarakat adat. Hasil dari pemetaan ini akan ada dokumen perencanaan tata guna lahan dan tata ruang wilayah desa yang menjadi pegangan pemerintah desa, kecamatan dan lembaga adat dalam pengurusan sumber-sumber kekayaan alam dan asset produksi untuk meningkatkan pendapatan. Peluang yang akan dicapai; Pemerintah daerah dapat memperhatikan kepentingan ruang bagi masyarakat untuk pengelola wilayah Desa melalui perencanaan Tata Guna Lahan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.



1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan di atas maka tujuan kegiatan PKW di wilayah studi yaitu Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Dengan demikian permasalahan mitra dalam kegiatan PKW ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang upaya-upaya penyelesaian konflik, pemanfaatan dan perlindungan ruang masyarakat adat Desa Talekung Punei.
2. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang desa.
3. Masih belum ada tanda batas antar Desa Talekung Punei dengan Desa Tetangga yang Permanen.
4. Kurang terinventarisasinya masalah, solusi dan inisiatif tingkat desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang desa.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi Mengatasi Permasalahan Kegiatan

Solusi untuk mengatasi permasalahan Program Kemitraan Wilayah ini adalah yaitu Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei.

Metode Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas ini terbagi dalam 2 tahap yaitu tahap Sosialisasi selama 1 bulan dan tahap Pendampingan selama 2 bulan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi ini diselenggarakan selama 1 (satu) bulan meliputi kegiatan sebagai berikut :

Teknis kegiatannya adalah:

- a. Melakukan sosialisasi dan metode PRA Pemetaan Tata Guna Lahan Desa.
- b. Melaksanakan pemetaan wilayah Desa Talekung Punei
- c. Memfasilitasi pembuatan peta tata Guna lahan dan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Desa secara berkelanjutan



- d. Melaksanakan pertemuan kampung sekaligus mendiskusikan tata batas desa
- e. Memfasilitasi kesepakatan batas sementara antar
- f. Memperjelas hak kelola masyarakat di Perencanaan tata ruang desa

2. Pendampingan

Proses pendampingan dilakukan untuk pelaksanaan di lapangan dimulai proses Survey ke lapangan sampai menyepakati hasil Peta yang sudah dibuat bersama masyarakat dan Pemerintah Desa. Dengan kegiatan pendampingan ini apabila mitra mengalami hambatan dalam pengerjaan, maka dapat dikomunikasikan dan didiskusikan solusinya bersama dengan tim pakar.

- a. Metode Pra untuk Penggalan Data dan Informasi
- b. Presentasi Hasil Pemetaan dan perencanaan Tata Ruang Wilayah Desa
- c. Diskusi/Pertemuan Kampung untuk menyepakati hasil Peta yang sudah dibuat bersama masyarakat dan Pemerintah Desa
- d. Analisis Peta dan Fungsi Peta Tata Ruang Wilayah Desa.

3. Evaluasi

Dalam proses ini, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program terutama dilihat dari ketepatan yang dihasilkan dari adalah Terinventarisasinya masalah, solusi dan inisiatif tingkat desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul kegiatan Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

3.1 Survey Lokasi dan Koordinasi

Tahap awal dari kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat ini adalah survey lokasi kegiatan yaitu di Desa Talekung Punei yang berjarak 167 km dari Kampus Universitas Palangka Raya merupakan salah satu dari 21 Desa di Wilayah Kecamatan Kapuas Murung yang berada kurang lebih 17 Km dari Ibu Kota Kecamatan Kapuas Murung yang merupakan salah satu desa rawan kebakaran hutan dan lahan gambut. Desa Talekung Punei mempunyai luas wilayah seluas $\pm 49.383.500$ meter per segi ditambah ada perusahaan sawit skala nasional yg berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Potensi yang dimiliki desa Talekung Punei adalah banyaknya lahan-lahan yang terlantar yang belum dimanfaatkan sesuai fungsi lahan.

Kondisi perekonomian di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapus Murung

Kabupaten Kapuas masih bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan karena mata pencaharian masyarakat desa mayoritas adalah bertani. Namun karena berbagai kendala yang dihadapi para petani misalnya tingginya kadar zat asam, sistem pengolahan tanah masih tradisional sampai pemasaran yang kurang lancar sehingga masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh terutama petani. Potensi yang dimiliki desa Talekung Punei adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Diharapkan dengan adanya kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini dapat memberikan solusi akan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.



Gambar 3. Kondisi Aksesibilitas Desa Talekung Punei



Gambar 4. Kantor Desa Talekung Punei



Gambar 5. Koordinasi dengan Kepala Desa Talekung Punei

Sebagian besar masyarakat Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas ini bermata pencaharian sebagai petani dan perkebunan karet merupakan rawan kebakaran hutan dan lahan gambut. Desa Jabiren mempunyai luas wilayah seluas $\pm 783.000.000$ meter per segi Potensi yang dimiliki Desa Jabiren adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun dengan adanya kebakaran hutan dan lahan gambut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat desa tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan Program Kemitraan Wilayah ini dapat memberikan solusi akan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas terutama dalam memperkuat partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat. Untuk alat dan bahan sosialisasi sebagian besar dibeli di Kota Palangka Raya.

3.2 Tahap Pelatihan dan Sosialisasi

Dalam tahap ini dari kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul kegiatan Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas ini berupa sosialisasi, persiapan alat dan bahan serta menentukan waktu pelaksanaan kegiatan Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Pemetaan Tata Ruang Desa berbasis Partisipatif ini ditetapkan di kawasan Desa Talekung Punei yang merupakan kawasan dekat lahan perkebunan dan hutan masyarakat dan kawasan permukiman penduduk.



Gambar 6. Perjalanan Sosialisasi Kegiatan Program Kemitraan Wilayah di Desa Talekung Punei

Dalam tahap pelatihan dari kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul kegiatan Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas ini masyarakat cukup antusias untuk mengikuti pelatihan dan diharapkan masyarakat nantinya mampu menerapkan teknologi ini kedepannya.



Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi Program Kemitraan Wilayah di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas



Gambar 8. Sosialisasi Kegiatan Program Kemitraan Wilayah di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

3.3 Tahap Pendampingan dan evaluasi

Proses pendampingan dilakukan selama 2 bulan. Proses pendampingan dilakukan untuk pelaksanaan di lapangan dimulai proses Survey ke lapangan sampai menyepakati hasil Peta yang sudah dibuat bersama masyarakat dan Pemerintah Desa. Dengan kegiatan pendampingan ini apabila mitra mengalami hambatan dalam pengerjaan, maka dapat dikomunikasikan dan didiskusikan solusinya bersama dengan tim pakar.

- a. Metode Pra untuk Penggalan Data dan Informasi
- b. Melaksanakan pemetaan wilayah Desa Talekung Punei
- c. Diskusi/Pertemuan Kampung untuk menyepakati hasil Peta yang sudah dibuat bersama masyarakat dan Pemerintah Desa
- d. Analisis Peta dan Fungsi Peta Tata Ruang Wilayah Desa.



Gambar 9. Kegiatan Pendampingan Program Kemitraan Wilayah di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas



Evaluasi

Dalam proses ini, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program terutama dilihat dari ketepatan yang dihasilkan dari adalah Terinventarisasinya masalah, solusi dan inisiatif tingkat desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil Koordinasi dengan pihak desa yang telah dilaksanakan, disampaikan minat masyarakat sangat tinggi untuk berpartisipasi dalam program kemitraan wilayah ini dikarenakan wilayah Desa Talekung Punei yang masih banyak lahan-lahan di wilayah ini masih belum dimafaatkan oleh masyarakat dan hasil yang didapatkan bisa membantu ekonomi masyarakat. Untuk itu akan dilakukan penyuluhan sekaligus bimbingan dan peragaan agar nanti masyarakat dapat lebih memperoleh informasi yang jelas tentang hak kelola masyarakat di Perencanaan tata ruang desa.

Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diperlukan Pembimbingan lanjutan guna lebih menginventarisir sumber daya alam ekonomis desa talekung Punei agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desa
2. Diperlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat demi kelancaran pelaksanaan program.
3. Dukungan pemerintah Kabupaten sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan.
4. Merupakan kegiatan yang wajib dijadwalkan dan menjadi kegiatan rutin agar bias dilaksanakan kepada seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amiany, 2016, Peran Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Perijinan dan Penyusunan RDTR, Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan PU Provinsi Kalteng, Palangka Raya
- BPN Provinsi Kalteng, 2016, Penyusunan RDTRK Berbasis Bidang Tanah, Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan PU Provinsi Kalteng, Palangka Raya
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, 2001, Jakarta
- Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, *Petunjuk Teknis Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013*, 2013, Jakarta
- Haryadi, Setiawan, B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Kerjasama Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Herlianto, M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986
- Ibrahim, Jabal T. 2002. *Sosiologi Pedesaan*, UMM Pres, Malang.
- Kuswartojo, Tjuk dkk, *Perumahan dan permukiman di Indonesia*, ITB Bandung, 2005



- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik, Raionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Riwut, Tjilik, 1997, *Kalimantan memanggil*, Yogyakarta
- PU Kabupaten Katingan, 2015, *Rencana Penyusunan Tata Ruang PerdesaanKecamatan Katingan Tengah, Katingan*
- PU Kota Palangka Raya, 2016, *Peran Strategis Penataan Ruang Dalam Pemberian Hak Atas Tanah dan Pencegahan Sengketa/konflik Penataan Ruang, Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan PU Provinsi Kalteng, Palangka Raya*